

**ASPEK VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUH. IRSAN MAULANA
NIM. 10500108028

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Muh. Irsan Maulana**, NIM: 10500108028, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Aspek viktimologi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. (Studi Kasus tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar).**,” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 25 Desember 2012

Pembimbing I

Pembimbing II

Rahman Syamsudin. SH, MH
NIP. 198212072009011010

Mustofa Umar. S.Ag, M.Ag
NIP. 196812181998031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 1 Maret 2014

Penyusun,

MUH. IRSAN MAULANA

NIM : 10500108028

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Aspek Viktimologi Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak dibawah umur. (Studi Kasus 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar). yang disusun oleh Muhammad Irsan Maulana, NIM: 10500108028, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 11 September 2013 M, bertepatan dengan 10 Ramadhan 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 1 Maret 2014 M.
28 Rabiul Akhir 1435 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr, H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	: Drs. Hamzah Hasan, M.Hi.	(.....)
Munaqisy I	: DR. Jumadi, SH., M.Hum.	(.....)
Munaqisy II	: Ahkam Jayadi, SH., MH.	(.....)
Pembimbing I	: Rahman Syamsuddin, SH., MH	(.....)
Pembimbing II	: Mustofa Umar, S.Ag., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr, H. Ali Parman, MA.
NIP. 195704141986031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Dzat Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang, atas segala limpahan rizki dan karuniaNya kepada penulis serta tidak lupa shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ASPEK VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR. KASUS 2009-2011 DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR.**

Penulisan hukum ini membahas membahas mengenai Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dan langkah yang ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Kasus tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun imateriil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Orang tua tercinta, Muh. Nawawi S.H dan Dra. Nurhaidah yang selalu membimbing dan tidak henti-hentinya mendoakan penulis serta memberikan segala perhatian baik moral maupun material.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. Hamsir, SH, M.Hum selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar memberikan izin serta arahan sejak akan dimulainya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Istiqamah, SH, MH selaku sekertaris jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Mustofa Umar. S.Ag, M.Ag dan Rahman Syamsudin. SH, MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi demi kemajuan Penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan hukum ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan penulis.
7. Saudara-saudara ku di UKM Seni Budaya eSA yang telah memberikan peneliti banya pelajaran tentang dinamika hidup berorganisasi, tentang dunia kesenian dan kebudayaan.
8. Teman-teman jurusan Ilmu Hukum Andi Ruli Gazali. SH, Sarsil MR. SH, Suriani SH, Muhammad Zubair Husain SH, Syamsul Rijal SH, Ariasti SH, Sitti Nurfaidah Said SH, Minarti SH, Nanni SH serta semua teman-teman angkatan 2008 atas kehangatan dan keceriaannya yang selalu menemani selama ini.
9. Teman Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan semua angkatan 2008 terima kasih telah menambah pengalaman dan cerita dalam hidup dan selalu menjadi kenangan.
10. Terima kasih kepada Khaerunnisa yang telah menjadi motivator peneliti dalam menyelesaikan jenjang S1 di UIN Makassar
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini baik secara moril maupun materiil.

Dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Gowa, 25 Desember 2012

Penulis

Muh Irsan Maulana
NIM.10500108028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Definisi Operasional	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	 22
A. Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak	22
B. Tinjauan Terhadap Pencabulan	28
C. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur	33
D. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	39
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	 41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan	41
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Populasi dan Sampel	43
F. Teknik Analisis Data	44
 BAB IV. HASIL PENELITIAN	 45
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur	45
B. Langkah-langkah Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur	49
 BAB V. PENUTUP	 57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	 61

ABSTRAK

Nama : MUH. IRSAN MAULANA
NIM : 10500108028
Judul Skripsi : Aspek viktimologi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. (Studi Kasus tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar).

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Aspek viktimologi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur studi kasus tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. 2. Untuk mencari langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian Deskriptif analitis, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan Sosiologi dan yuridis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode Field Research dan Library Research, yaitu dengan menghimpun data dan menyeleksi data yang relevan dengan Aspek Viktimologi tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan hasil analisis dari sumber data yang diperoleh kebanyakan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dalam kurun waktu tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar disebabkan oleh hubungan relasi anak yang tidak terkontrol oleh orang tua, tingkat ekonomi yang rendah, kurangnya penanaman nilai-nilai agama pada anak yang berdampak pada perilaku yang menjebak dirinya menjadi seorang korban dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah 1. tindak pencegahan secara preventif yang melalui pendekatan moralistik dan ablistik, 2. Tindak pencegahan secara preventif, 3. Rehabilitasi terhadap korban pencabulan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan secara pesat dalam bidang hukum semenjak era orde baru berakhir, juga mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan teknologi, tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan. Apa yang disebut dengan istilah “kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari.

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dasar tahun 1945 bahwa negara kesatuan republik indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*). untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sebuah semboyan yang mengatakan bahwa kejahatan timbul bukan karena ada niat dari pelaku akan tetapi karena adanya kesempatan. Adanya kesempatan itulah kejahatan dapat terjadi. Adapun kapan, di mana kejahatan itu terjadi sulit diprediksi atau ditebak. Kejahatan itu sulit untuk dimengerti, apapun bentuk, jenis, besar maupun kecilnya kejahatan tersebut tetap berdampak buruk. Kejahatan apapun dapat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Beragam kejahatan yang dilakukan oleh para pelakunya seiring dengan perkembangan dan kemajuan di setiap negara terutama di Indonesia. Yang menjadi korbannya tidak hanya pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat, akan tetapi anakpun dapat menjadi korban dari suatu kejahatan seperti tindak pidana kekerasan, perdagangan, eksploitasi, penelantaran, kejahatan seksual dan lain-lain. Mengenai masalah anak, anak sering mendapatkan perlakuan yang salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban kejahatan seksual khususnya pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Anak sebagai aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan

¹ Undang-Undang RI. No. 23 tahun 2002. (Jakarta, Sinar grafika, Agustus 2003).h. 1

anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke empat yaitu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur termasuk pula dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang menjadi korban adalah anak di bawah umur, yang notabene secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa dan anak sebagai karunia Tuhan dan asset bangsa.

Dalam hal kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur mengingat usia mereka yang relatif sangat muda kebanyakan dari mereka yang menjadi korban belum mengetahui atau tidak mengerti mengenai arti perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sangat sedikit kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan kejahatan pencabulan tersebut. Sebagian besar kasus-kasus tersebut diketahui berasal dari laporan keluarga korban, karena telah terjadi luka pada bagian tubuh anak tersebut atau cerita polos dari anak-anak yang bersangkutan mengenai peristiwa yang dialaminya.

² Yasir Arafat, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. (Surabaya Permata Press) h. 34.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ini tidak dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dari segala tindakan yang dapat merugikannya.

Ketika terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, maka yang sangat perlu diperhatikan adalah aspek viktimologi. Viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, dengan mengkaji aspek viktimologi secara tidak langsung kita telah melakukan upaya pencegahan terjadinya viktimisasi. Sudah pasti anak yang telah mengetahui bahwa dirinya telah dicabuli itu akan menjadi aib baginya dan akan berdampak pada kesehariannya. Realitas pergaulan dan cara berpakaian anak dibawah umur kini sangat jauh dari nilai-nilai agama, maka wajar jika kini banyak terdengar kasus tindak pidana pencabulan karena memang korban layak sebagai korban pencabulan atau korban sebagai pemicu terjadinya tindak pidana yang dimaksud. Maka dari itu pendidikan untuk memahami nilai-nilai agama sangat penting agar anak-anak berperilaku dan berpakaian wajar menurut agama khususnya islam. al Qur,an surat An Nuur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحِفْظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ^٣ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^٤ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-nuur : 31).³

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya* (Semarang: PT. Toha Putra, 1989), h.

Dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebenarnya perangkat perundang-undangan di Indonesia sudah cukup lengkap, yaitu Undang-undang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dan (2) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285. Mengenai batasan anak di bawah umur, dapat dipedomani dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Peradilan Anak yang sangat diperlukan dalam menganalisa masalah tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Namun perangkat perundang-undangan sepertinya belum mampu menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Maka dari itu seperti uraian diatas bahwa dengan mengkaji aspek viktimologi semoga dapat melahirkan suatu solusi yang dapat menekan volume tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis sangat tertarik untuk menulis dan menganalisa tentang **Aspek viktimologi tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. (Kasus tahun 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar)**. sebagai salah satu tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur?
2. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi cakupan penelitian maka pada penelitian ini, penulis meneliti mengenai Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar dan langkah-langkah apa yang ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan target waktu penelitian yang dilakukan dari tanggal 15 Desember sampai dengan 20 Desember 2012.

D. Definisi Operasional

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban dan *Logos* yang berarti ilmu. Viktimologi berarti suatu study yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Pada awalnya, di tahun 1880-an, viktimologi adalah sekadar studi kejahatan yang mempergunakan perspektif korban dan pada awalnya pula, teori viktimologi yang berkembang adalah '*victim-blaming theory*'.⁴

Teori-teori viktimologi kontemporer

⁴ <http://rahman7syamsuddin.blogspot.com/search?updated-max=2011-09-25T20:56:00-07:00&max-results=1&start=2&by-date=false>. Diakses tanggal 27 Desember 2012

- a. *Situated Transaction Model* (Luckenbill, 1977): dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang vatal
- b. *Threefold Model* (Benjamin & Master): kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori: *precipitating factors*, *attracting factors*, *predisposing* (atau socio- demographic) *factors*.
- c. *Routine Activities Theory* (Cohen & Felson, 1979): Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni : target yang tepat, pelaku yang termovitasi dan ketiadaan pengamanan.⁵

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

- a. Yang sama sekali tidak bersalah
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku
- d. Yang lebih bersalah dari pada pelaku
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban yaitu :

⁵ *ibid.*

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
- b. *latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
- c. *propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan atau memicu kejahatan
- d. *participating viktimes* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- e. *valse victims* adalah mereka yan menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari persppektif tanggung jawab korban itu sendiri maka *Stephen Schafer* mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu :

- a. *unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan sipelaku dan menjadi korban karena memang potemsial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada pada pihak korban
- b. *propocative viktimes* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama

- c. *participating vikims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah yang besar tanpa pengawasan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak vikims* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti perempuan, anak-anak, dan manusia lanjut usia (Manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak vikims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada penjahat atau masyarakat
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g. *Political vikims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.⁶

berdasarkan pembagian korban yang dikemukakan oleh para ahli ada beberapa kategori korbanlah yang menjadi pemicu terjadinya suatu kejahatan. Korban dalam lingkup Viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok , korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan atau pihak pelaku serta mereka secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.⁷

Ruang lingkup viktimologi sangat luas, tidak hanya terbatas pada individu tetapi juga terhadap korporasi, kelompok, swasta, maupun pemerintah dan peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban, hubungan korban dengan pelaku, dan peranan korban dalam suatu peradilan.

Pada suatu kasus, tidak sedikit korban berperan sebagai korban partisipatif. Maksudnya adalah korban pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut. Mungkin karena cara berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama atau tingkah laku yang membuat pelaku terpancing untuk melakukan tindakan cabul terhadap korban. Namun bukan berarti ini menjadi alasan untuk membuat

⁶ Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 52.

⁷ *Ibid.* h.43

korban merasa di atas angin tapi lebih mengerucut dalam rangka atau langkah-langkah mencegah terjadinya berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial, dan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi baik secara langsung atau tidak langsung karena korban adalah elemen penting dalam suatu perkara.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian “Perkosaan” menurut pasal 289 yang berbunyi : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁸

Dalam Al-quran tidak dikenal istilah perkosaan, pencabulan, atau pemerkosaan yang ada hanya zina. Zina tidak jauh berbeda dengan istilah pencabulan atau perkosaan karena zina yang dimaksud dalam Al-quran tetap menitik beratkan terhadap perbuatan seksual diluar hubungan pernikahan dan bisa saja dilandaskan atas dasar suka sama suka dalam melakukan perbuatan maksiat. Al-qur'an memerintahkan untuk menjauhi zina dalam surah al-Isra' : 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya :

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung . PT. Karya Nusantara). H. 210

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-israa'. : 32)⁹

Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹⁰

Istilah “anak di bawah umur” tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah sebagai berikut :

Manusia berasal dari adam dan hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai “anak” terdapat dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seorang yang belum mencapai lima belas tahun.¹¹

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seseorang “anak” ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHP.¹²

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 429

¹⁰ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, (Jakarta : Refika Aditama, 2001), h. 40.

¹¹ R . Soesilo,, *Loc. Cit*

Menurut R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksudkan dengan cabul adalah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, maraba- raba anggota kemaluan, maraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian pembuatan cabul akan tetapi dalam Undang- undang disebutkan tersendiri. Dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/ kesusilaan, dapat dimakkan sebagai perbuatan cabul.

Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan pemaksaan atau tanpa pemaksaan. Pelanggaran seksual dengan unsur pemaksaan akan menimbulkan perlukaan dan berkaitan trauma emosi yang dalam bagi perempuan.

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur pasal 290 sub 1 e.

a. Unsur objektif:

1. Barang siapa ;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal sub

¹² R. Subekti. *"KUHP dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan..* (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1990). h. 76.

1e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tidak pidana tersebut.

2. Melakukan pencabulan dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium- ciuman, meraba- raba anggota kemaluan, meraba- raba, buah dada dan sebagainya.

b. Unsur Subyektif:

Diketuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya,.

Bahwasanya seseorang berada dalam keadaan pinsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

Unsur-unsur pasal 290sub 2e

a. Unsur Objektif:

1. Barang siapa;

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 sub KUHP, maka ia dapat sebut dari tidak pidana tersebut

2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopana) atau perbuatan yang keji dalam kelingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya.

b. Unsur Subjektif:

1. Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawani.

Ketahui atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat perkawinan

hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita..

Unsur-unsur pasal 290 sub 3e

a. Unsur Objektif:

1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan perkataan batrang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 290 sub 2e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari pidana tersebut.

2. Membujuk (menggoda) seseorang

Pengertian “membujuk” tidak persyaratan dipergunakannya cara-cara tertentu agar seseorang melakukan suatu perbuatan. Hal ini dapat terjadi dengan permintaan pelaku agar dipegannya alat kelaminnya.

3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan

tiada kawin. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dewasa dengan seseorang yang belum berumur 15 tahun.

b. Unsur Subjektif:

1. Diketahui atau patut harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masanya buat dikawani.

Dalam pasal 82 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perbuatan anak juga diatur mengenai pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Bunyi pasalnya yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.-(enam puluh juta rupiah)

Yang dimaksud dengan “anak” sebagai korban menurut pasal ini adalah anak yang usianya belum genap 15 (lima belas) tahun. Pasal ini tidak mengkualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun. Mengenai usia yang masih dibawah 16 (enam belas) tahun, tidak perlu diketahui oleh pelaku.

Menurut Undang- undang No.39 tahun 1999 tentang hak Azasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Mengenai arti “belum pantas buat kawin” yaitu bahwa menurut pasal 7 Undang-undang perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun dengan kemungkinan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pria maupun wanita.

Pengertian melakukan perbuatan cabul dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap dirinya atau membiarkan dilakukannya

perbuatan cabul terhadap dirinya, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan seks seperti mencium. Meraba- raba alat kelamin atau buah dada dan sebagainya.

E. Tujuan dan manfaat penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - 1) Untuk mengetahui factor-faktor terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur
 - 2) Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Tujuan Subjektif
 - 1) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
 - 2) Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori

dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang sangat berarti bagi penulis.

- 3) Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi Ilmu hukum terkhusus untuk hukum pidana.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sembari mencoba mencari solusi untuk menekan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang berlandaskan ketakutan akan kerusakan moral calon generasi bangsa.
- b. Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang berminat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan khususnya terutama dalam hukum acara pidana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- c. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur serta faktor penyebabnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Di dalam ketentuan pasal 1 undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 mengemukakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

2. Pengertian Anak

Anak menurut kamus bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.²

1. Pengertian anak menurut dari aspek agama

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan

¹ *Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 3

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta; Balai pustaka, 1988), h. 25

mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.³

Istilah “anak di bawah umur” tersebut dalam hal ini disetarakan dengan sebutan anak. Pengertian anak tersebut menurut sejarah ialah sebagai berikut :

Manusia berasal dari adam dan hawa dan dari kedua makhluk Tuhan ini lahirlah keturunan yang kemudian beranak-pianak menjadi kelompok-kelompok yang semakin membesar berpisah dan berpencar satu sama lain

³ <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>. diakses pada tanggal 15 oktober 2012.

berupa suku dan kabilah dan bangsa-bangsa seperti sekarang ini, seperti apa yang difirmankan Tuhan dalam Al-Hujurat 13⁴

2. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945.

3. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang Peradilan anak

Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatsi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatsi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau

⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986), h. 169.

perkawinanya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.⁵

4. Pengertian anak berdasarkan Undang-undang perkawinan

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukakan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

5. Anak menurut Hukum adat/kebiasaan

⁵ . Undang-undang perlindungan anak. Op.cit., h.78

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata.

6. Pengertian anak menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: - Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. - Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah dala masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.⁶

⁶ . Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta, oktober 1985, PT. Intermasa). h. 48

7. Pengertian Anak menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkakan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: - Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. - Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatanegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. - Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. - Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. - Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Jika ditilik pada pasal 45 KUHP maka anak didefinisikan sebagai anak yang belum dewasa apabila belum

berumur 16 tahun. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Dengan demikian di dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Jadi dari berbagi definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.⁷

B. Tinjauan Terhadap Pencabulan

Pengertian pencabulan.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktifitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak baik pria maupun wanita baik dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pencabulan adalah :

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar pasal demi pasal*.(Bandung, Karya Nusantara, 1986) h. 281.

Kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji sifatnya, tidak sesuai dengan adat sopan santun, tidak susila, bercabul : berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabuli : menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.⁸

Di dalam kamus hukum juga dijelaskan mengenai arti kata pencabulan dan dapat diartikan sebagai berikut :

Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan, kesusilaan, hal ini secara umum diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 281 dan 282, yaitu : diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁹

Menurut R. Sughandi adalah

Segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan pria atau perempuan terhadap anak dibawah umur baik pria maupun wanita dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan merupakan suatu gangguan psikoseksual dimana orang dewasa memperoleh kepuasan seksual bersama seorang

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.* H 142

⁹ Yan Pramadya Puspita. *Kamus hukum edisi lengkap*. (Semarang, Aneka Ilmu, 2008), h. 188.

¹⁰ R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1998), h. 305.

anak pra remaja. Cirri-cirinya adalah berbuat atau berfantasi tentang kegiatan seksual dengan cara yang paling sesuai untuk memperoleh kepuasan seksual.¹¹

Dalam hal tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukan dengan kesalahan, dengan perkataan. Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 82 adalah :

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atau siapa yang terdakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Tidak lain untuk menghindari adanya *error in personal* dalam menghukum seseorang.

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan

¹¹ Defenisi tindak pidana pencabulan terhadap anak. http://www.freewebs.com/pencabulan/pada_anak/identifikasi_pedofilia.htm._diunduh tanggal 15 oktober 2012_.

atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan. Atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi dalam unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternatif, maksudnya jika salah satu saja perbuatan sudah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam pelecehan seksual terdapat unsur-unsur yang meliputi

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan nonfisik
4. Tidak ada kesukarelaan

. Di berbagai negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah “kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu “persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, maka definisi

pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.”¹²

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian “Perkosaan” menurut pasal 289 yang berbunyi : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.¹³

Dalam Al-quran tidak dikenal istilah perkosaan, pencabulan, atau pemerkosaan yang ada hanya zina. Zina tidak jauh berbeda dengan istilah pencabulan atau perkosaan karena zina yang dimaksud dalam Al-quran tetap menitik beratkan terhadap perbuatan seksual diluar hubungan pernikahan dan bisa saja dilandaskan atas dasar suka sama suka dalam melakukan perbuatan maksiat. Al-qur'an memerintahkan untuk menjauhi zina dalam surah al-Isra' : 32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّانِي تَقَرَّبُوا وَلَا

Terjemahannya :

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-israa' . : 32)¹⁴

¹² <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html> “*Definisi Tindak Pencabulan Anak dibawah Umur*” (Diakses tgl. 24 agustus 2012).

¹³ R. Soesilo, *op.cit.* h. 210

¹⁴ Al-quran. (PT. Karya Toha Putra).

Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan” adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹⁵

C. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur.

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur kurang begitu populer melainkan kata cabul. akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin berkembang, begitu halnya terhadap tingkah laku manusia yang semakin hari semakin bertambah maka dirumuskanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pencabulan kurang begitu dikenal melainkan kejahatan terhadap kesusilaan diatur di dalam buku ke dua pada bab XIV.

Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undangan Nasional dan Internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berisi tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban Negara, masyarakat dan keluarga terhadap anak.

Pada undang-undang nomor 23 tahun 2002 bab 1 ketentuan umum pasal 1 ayat (1) “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

¹⁵ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, (Jakarta : Refika Aditama, 2001), h. 40.

termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶ Ayat (2) “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi sangat jelas kategori seseorang yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun dan seseorang yang masuk kedalam kategori tersebut berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kejahatan agar tumbuh kembangnya berjalan sewajarnya.

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah *strafbar feit*. Di dalam bahasa Belanda, *Strafbar* yang berarti dapat dihukum, sedangkan *feit* yang berarti suatu kenyataan atau fakta.

Dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas di atas lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

¹⁶ t.p, (UU RI No. 23 Th. 2002) (Sinar Grafika).

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditunjukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti :

1. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
2. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
4. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Dari syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar

ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pada umumnya. jadi sangat jelas bahwa Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan karena telah melanggar norma kesopanan dan telah diatur dalam KUHP Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan.

KUHP pasal 285 “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Lebih mengerucut lagi kepada pasal 287 ayat (1) yang berbunyi “ barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Selain itu telah ditetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pemedanaan terhadap pornografi anak, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan

Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa:

1. Anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus.
2. Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat.
3. Mengakui bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian.
4. Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas.
5. Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang

disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak.

6. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran".
7. Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum yang berkenaan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan *Standard Minimum* Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata.

8. Mengakui pentingnya kerjasama internasional untuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang.¹⁷

D. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas dan tidak mengindahkan lagi kaedah akhlak mengenai laki-laki dan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dari masyarakat
5. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya

¹⁷ <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10804/>. tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses pada tanggal 25 agustus 2012

6. Keinginan pelaku untuk melakukan pelampiasan terhadap sikap atau ucapan korban yang dianggap menyakiti dan merugikan¹⁸

¹⁸ Rena Yuliana, *Viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), h. 21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia.

B. Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Sosiologis dan Yuridis.

1. Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan memilih fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan
2. Yuridis adalah pendekatan dengan menggunakan undang-undang.

C. Teknik Pengumpulan data

Untuk melakukan penelitian diperlukan data yang mencakup, pengumpulan data tersebut harus dengan teknik tertentu, agar data tersebut benar-benar sesuai dengan fakta. Di dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Penelitian lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dengan teknik wawancara terhadap Hakim yang pernah menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur

kemudian mengumpulkan populasi atau data-data terkait tindak pidana pencabulan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Penelitian pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini.

D. Jenis dan sumber data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan cara wawancara secara tersusun atau spontan kepada populasi dan sample yang terkait dalam penelitian ini.

2. Sumber data sekunder

Semua bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang –undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan itu, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang- undang nomor 4 Tahun 1997 tentang kesejahteraan anak
3. Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, Jurnal, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, serta buku-buku perpustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, internet, dan lain-lain

E. Populasi dan Sample

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi tidak harus berwujud saja, tetapi

dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, pasal perundang-undangan, dan data-data.

Sample adalah cara-cara untuk memperkecil kekeliruan generalisasi dari sample populasi dengan cara purposive sampling. Sample pada hal ini adalah salah satu kasus yang diambil dari Pengadilan Negeri Makassar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang dihasilkan dari data deskriptif analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari selama masa penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. Nomor Perkara 801/Pid.B/2012/PN. MKS

Sebelum membahas jauh tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan data hasil penelitian dari Pengadilan Negeri Makassar.

Dari penelitian yang dilakukan di pengadilan Negeri Makassar, peneliti mendapatkan data mengenai kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2007-2011 yang dimana dalam kurun waktu tersebut ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun. Lihat table hasil penelitian di bawah ini.

Perkara pidana tahun 2007-2011

Pasal	Jenis	Jumlah				
		2007	2008	2009	2010	2011
281, 282, 283 dan 296	Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur	54	79	67	93	81

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2007-2011 di Makassar terdapat 374 kasus dimana pada tahun 2007 terdapat 54 (lima puluh empat) kasus, tahun 2008 terdapat 79 (tujuh puluh Sembilan) kasus, tahun 2009 terdapat 67 (enam puluh tujuh) kasus, tahun 2010 terdapat 93 (sembilan puluh

tiga) kasus dan tahun 2011 terdapat 81 (delapan puluh satu) kasus. sangat jelas pasang surut yang terjadi tiap tahunnya. Berdasarkan data di atas peneliti mengkategorikan interaksi sosial seorang anak dibawah umur itu sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual dan pasang surutnya kasus dari tahun ke tahun itu memperjelas kondisi anak dibawah umur itu tidak aman.

Adapun hasil wawancara dengan hakim yang menangani salah satu kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu Pudjo Hunggul. H, SH.MH pada tanggal 5 Desember 2012 mengatakan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masuk selama kurun waktu 2007-2011 kebanyakan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :

- a. Perkembangan teknologi yang begitu pesat yang memudahkan mengakses situs porno dan memperoleh informasi tentang budaya barat kemudian menjadi tren di kalangan anak di Indonesia, khususnya di Makassar yang sangat berdampak besar bagi realita hidup anak dibawah umur. Misalnya cara berpakaian.
- b. Hubungan relasi yang tidak terkontrol oleh orang tua, pihak keluarga yang kurang perhatian terhadap anaknya seperti membiarkan anaknya keluyuran sampai tengah malam, tidak memberikan tekanan untuk membatasi pergaulan pada hal-hal tertentu sehingga anak merasa bebas dan dengan mudah dibujuk oleh pelaku atau dipaksa untuk dicabuli.
- c. Selain itu tingkat ekonomi yang rendah. Dalam hal yang dimaksud adalah ketika seseorang kesusahan dalam bidang ekonomi, hal tersebut

akan mengganggu akal dan pikiran yang dapat berakibat kelakuan yang tidak terkontrol oleh dirinya sendiri

Berdasarkan kasus yang terjadi pada tahun 2012. Yaitu kasus pidana dalam putusan nomor : 801/Pid.B/2012/PN. MKS yang di putuskan oleh pengadilan dimana terdakwa adalah Ansar Nasrul, Ais, Erik bin Nasrul yang bekerja sebagai buruh bangunan. Bertempat tinggal di Jln. Abd. Dg. Sirua Lr. III. No. 10 kota Makassar. Yang dinyatakan bahwa Terdakwa Ansar Nasrul Erik Bin Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan telah di tetapkan bahwa masa tahanan yang dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Barang bukti berupa nihil dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap sample kasus di atas yang disandingkan dengan pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan hasil wawancara terhadap hakim menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kasus tersebut adalah

1. Hubungan relasi yang tidak terkontrol oleh orang tua sehingga secara tidak langsung posisi korban berada pada posisi yang tidak aman atau rentan menjadi korban pencabulan karena antara korban dan pelaku memang memiliki relasi atau hubungan yang erat atau yang sering disebut pacaran. artinya pencabulan tidak hanya semata-mata terjadi

karena adanya dorongan seksual yang tidak bisa dibendung oleh pelaku tetapi juga situasi dan kondisi yang mendukung dan jelas bahwa kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri. Dari berbagai faktor terkait dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, adanya sebuah relasi lebih dahulu (dalam ukuran intensitas tertentu) antara korban dengan pelaku menjadi potensi yang cukup besar dalam hal tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Kalaupun ada korban yang tidak pernah terkait dengan pelaku, maka prosentasenya sangat kecil hubungan horizontal (laki-laki dan perempuan) telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif dan tidak manusiawi.

2. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat dan ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Terkait tentang norma-norma keagamaan, pada semua kasus pelecehan seksual menandakan bahwa pelaku dan korban tidak memiliki pengalaman dan penghayatan yang dalam terhadap norma-norma keagamaan karena dalam Islam jelas mengajarkan umat muslim untuk tidak mendekati zinah. Sedangkan terkait pada posisi pelaku, dalam hal ini pelaku yang tidak memiliki pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan bisa jadi hal itulah yang menjadi penyebab ketidak

mampuan mengontrol emosi dan nafsu seksualnya sehingga membutuhkan pelampiasan.

3. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dari masyarakat

B. Langkah-langkah Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur

Setelah peneliti memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, peneliti mencoba untuk memaparkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan ini.

Persoalan pencabulan terhadap anak dibawah umur harus mendapat perhatian penting dari semua elemen masyarakat, terutama aparat penegak hukum karena kejahatan seperti ini berkaitan dengan beberapa kemungkinan yang timbul akibat perbuatan tersebut misalnya akibat fisik dari perbuatan tersebut adalah kerusakan pada organ reproduksi anak atau anak dapat tertular penyakit seksual dan bahkan dimungkinkan mengalami kehamilan dan psikologi anak. Maka dari itu kontrol masyarakat juga masuk kedalam faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan karena masyarakat atau aparat sebaiknya lebih sensitif terhadap situasi dan kondisi anak yang menjadi korban pencabulan. Upaya untuk menekan terjadinya tindak pidana sekecil mungkin tentu tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari masyarakat.

Dalam memecahkan dan mencari solusi atas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sebenarnya ada banyak alternatif selain hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seperti hukum Islam. Kehadiran hukum Islam dapat menjadi suatu alternatif istimewa untuk memecahkan problem yang dihadapi oleh masyarakat termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Misalnya dalam aspek keluarga, eksistensi penerapan hukum Islam terasa dapat di ambil manfaatnya oleh masyarakat. Dengan mengadopsi sejumlah ketentuan dalam hukum islam yang mengenai perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan lainnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah kurangnya pengamalan terhadap nilai-nilai agama khususnya islam. Jika faktor ini di masukkan kedalam aspek keluarga maka jelas bahwa keluarga adalah salah satu elemen terpenting dalam penerapan nilai-nilai agama yang memiliki dampak besar dalam penerapan keseharian anak pada lingkungan.

Pada hukum pidana islam itu sarat dengan advokasi HAM, atau memberikan jaminan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus untuk memperoleh keadilan.

Firman Allah SWT :

بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَةِ تُؤَدُّوْا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ
(٥٨) بَصِيرًا سَمِيعًا

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Secara garis besar hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana islam sama-sama menitik beratkan pada pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, membuat pelaku jera atau tidak berkeinginan mengulang tindak kejahatan atau pelanggaran, dan mendidik anggota masyarakat supaya tidak mengikuti jejak pelaku kejahatan atau pelanggaran sebelumnya.¹

Hukum pidana Islam bukan suatu yang menakutkan bagi manusia, melainkan ketentuan yang mencegah timbulnya rasa takut dalam diri manusia dan kemungkinan menjadi korban tindak kejahatan. Sanksi hukumnya memang seperti membangkitkan bulu roma bagi pelaku tetapi bagi anggota masyarakat sanksi tersebut mengandung substansi moral kemanusiaan yang tinggi.

Selain alternatif hukum islam ada juga upaya atau metode untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yaitu :

¹ Abd. Wahid, & Muh. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (cetakan I, Bandung, Rafika Aditama, 2001), h.102.

1. Upaya pencegahan yang bersifat preventif

Upaya pencegahan yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi². Bagaimanapun kejahatan tidak akan pernah habis dan upaya preventif ini hanya bisa mengurangi dengan melenyapkan factor-faktor penyebab kejahatan tersebut. usaha pencegahan ini dapat berdampak baik bagi masyarakat karena akan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat, oleh sebab itu usaha pencegahan dapat dilakukan dengan pendekatan secara moralistik dan pendekatan secara ablionistik.

a. Pendekatan Secara Moralistik

Usaha pencegahan kejahatan dengan menggunakan pendekatan secara moralistic adalah pendekatan yang dilakukan dengan pembinaan kepada masyarakat dengan berbagai bentuk seperti penyuluhan atau seminar-seminar yang dapat member informasi kepada masyarakat cara mengantisipasi kejahatan, ketentuan hukum sehingga masyarakat tidak berbuat kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan.

Pembinaan kepada masyarakat seperti ini dapat dilakukan oleh tokoh agama, aparat hukum, para pendidik/guru, organisasi, bahkan mahasiswa. Dalam kejahatan pencabulan biasanya anak yang menjadi korban akan mengalami dampak psikologi yang

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 49.

dapat dilihat dari tingkah laku, maka dari itu anggota masyarakat harus bersama-sama saling mengawasi segala perubahan tingkah laku pada anak yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggal.

Upaya penyuluhan yang dilakukan juga harus merata kepada setiap lapisan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang tingkat pendidikan dan perekonomiannya rendah. Karena tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat yang tingkat pendidikan dan perekonomian rendah cenderung tidak memperhatikan persoalan moral dan etika.

Upaya pendekatan secara moralistic sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan agar tercipta rasa kesadaran terhadap hukum sehingga dengan sendirinya tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.

Demikian pula kepada orang tua, hendaknya harus lebih memperhatikan perkembangan anak-anaknya dan menanamkan nilai-nilai agama serta mendidik mental anak sejak dini. Baik buruknya seorang anak juga bergantung dari didikan dan contoh yang diperoleh dari orang tua.

Pada pendekatan secara moralistic, peran masyarakat juga sangat penting karena jika masyarakat menjadikan persoalan pencabulan sebagai masalah bersama yang diperbincangkan secara serius dalam wacana public, akan berdampak kepedulian dan

memicu masyarakat untuk lebih responsible terhadap kasus-kasus tindak pidana percabulan terhadap anak dibawah umur.

b. Pendekatan Secara Abolionistik

Upaya pencegahan secara abolionistik adalah pendekatan dengan upaya-upaya lanjutan setelah mengetahui factor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan yang bersandar pada ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi dan lain-lain.

Pendekatan secara abolionistik ini harus mencari factor yang menyebabkan timbulnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Setelah factor penyebab diketahui dilakukanlah upaya penanggulangan dan pemberantasan. Selama factor-faktor penyebab kejahatan masih hidup dalam masyarakat maka kejahatan itu akan sulit dicegah.

Seperti yang telah disebutkan, salah satu faktor penyebab terjadinya pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah perkembangan teknologi yang meemudahkan untuk mengakses situs-situs porno, situs porno yang diakses akan mendorong rasa penasaran yang berujung pada hasrat untuk melampiaskan nafsu.

Dalam upaya penanggulangan, orang tua juga sangat berperan penting. Orang tua harus selalu mengawasi lingkungan atau pergaulan anak agar sedapat mungkin terhindar dari hal yang tidak diinginkan, selain pengawasan pemberian pendidikan seks kepada anak juga sangat penting untuk menanggulangi kejahatan

ini karena pendidikan tentang seks sebenarnya bukan hal yang tabuh. Bahkan pendidikan seks pada anak sedini mungkin akan berdampak positif karena dapat menghindarkan anak dari orang yang ingin memanfaatkan ketidaktahuan anak akan hal tersebut.

2. Upaya yang Bersifat Represif

Penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya penanggulangan yang memberikan tekanan terhadap pelaku kejahatan agar merasakan efek jera selain keadilan bagi korban dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya. efek jera dimaksudkan agar menjadi contoh bagi masyarakat lain agar masyarakat enggan melakukan kejahatan tersebut.

Dalam hal ini, polisi, jaksa dan hakim yang memegang peranan penting. Pihak kepolisian harus bertindak cepat demi terciptanya keadilan melalui pengusutan dengan bantuan masyarakat lalu mengajukannya ke pengadilan untuk mendapatkan pembuktian objektif.

3. Rehabilitasi Terhadap Pelaku

Terlepas dari upaya pencegahan tindak pidana pencabulan, penjatuhan sanksi berdasarkan undang-undang yaitu pasal 290 KUHP dimana pelaku yang melanggar pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, namun dalam penerapannya terkadang sangat jauh dari ancaman yang sesungguhnya. Namun bukan berarti penjatuhan sanksi yang berat juga memberikan

efek jera kepada pelaku. Posisi pelaku yang telah menjalani sanksi tidak akan menjamin bahwa ketika pelaku telah terbebas dari hukumannya dia tidak akan mengulangi perbuatannya. Berangkat dari factor terjadinya pencabulan pelaku selama menjalani hukuman akan memperoleh binaan atau Rehabilitasi maksudnya adalah pelaku akan menjalani suatu proses pembinaan selain menjalani masa hukuman sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas perbuatannya. Proses rehabilitasi ini bermaksud untuk mengubah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Proses rehabilitasi ini sangat penting karena berdampak positif bagi pelaku setelah menjalani hukuman.

Proses rehabilitasi ini bukan hanya untuk pelaku, namun korban juga membutuhkan hal tersebut. Mengingat yang menjadi korban adalah seorang anak, tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sementara anak yang telah menjadi korban tidak menutup kemungkinan akan mengalami trauma atau pengaruh psikologi yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya. Proses rehabilitasi terhadap korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang diharapkan bisa berdampak mengembalika semangat untuk tetap menjalani hidup dan meneruskan cita-cita bangsa kelak. Dari sekian upaya dan pendekatan diharapkan dapat mengubah tingkah laku para pelaku yang sudah tersesat menjadi anggota masyarakat yang baik dan bisa menciptakan rasa aman dan tentram dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penjelasan bab hasil penelitian maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang masuk selama kurun waktu 2007-2011 di Pengadilan Negeri Makassar kebanyakan dipengaruhi oleh faktor
 - a. Hubungan relasi yang tidak terkontrol oleh orang tua, Pihak keluarga yang kurang perhatian terhadap anaknya seperti membiarkan anaknya keluyuran sampai tengah malam, tidak memberikan tekanan untuk membatasi pergaulan pada hal-hal tertentu sehingga anak merasa bebas dan dengan mudah dibujuk oleh pelaku atau dipaksa untuk dicabuli apa lagi psikologi korban yang notabenenya masih dibawah umur.
 - b. Perkembangan teknologi yang begitu pesat yang memudahkan mengakses situs porno dan memperoleh informasi tentang budaya barat kemudian menjadi trend di kalangan anak di Indonesia, khususnya di Makassar yang sangat berdampak besar bagi realita hidup anak dibawah umur. Misalnya cara berpakaian.
 - c. Tingkat ekonomi yang rendah. Dalam hal yang dimaksud adalah ketika seseorang kesusahan dalam bidang ekonomi, hal tersebut akan mengganggu akal dan pikiran yang dapat berakibat kelakuan yang tidak terkontrol oleh dirinya sendiri

- d. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat
- 2. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah :
 - a. Upaya pencegahan yang bersifat preventif maksudnya adalah upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi dengan melalui pendekatan moralistik dan ablionistik.
 - 1) Pendekatan moralitas adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat untuk memberikan pemahaman tentang peraturan-peraturan yang berlaku, terkhusus tindak pidana pencabulan seperti penyuluhan tentang ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencabulan dan dampak dari tindak pidana tersebut dan itu sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan agar menumbuhkan rasa kesadaran hukum dan secara tersendiri akan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram.
 - 2) Pendekatan ablionistik adalah pendekatan dengan upaya lanjutan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan berdasarkan pada pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi dan psikologi dan lain-lain
 - b. Upaya penanggulangan yang bersifat represif maksudnya adalah upaya penanggulangan yang memberikan tekanan terhadap pelaku

kejahatan agar merasakan efek jera selain keadilan bagi korban dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas perbuatannya

c. Rehabilitasi

Rehabilitasi maksudnya adalah suatu proses pembinaan kepada pelaku selama menjalani hukuman sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas perbuatannya. Proses rehabilitasi ini bermaksud untuk mengubah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukumannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur sebaiknya anak diberikan pendidikan seks ssejak dini oleh orang tua, institusi pendidikan dan instansi terkait.
2. Pelaku pencabulan harus diberikan hukuman yang tegas, sebab dampak perbuatannya pada korban adalah penderitaan seumur hidup.
3. Terapi pemulihan terhadap korban yang harus lebih maksimal mengingat korban pada hal ini adalah anak di bawah umur, yaitu calon generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dilindungi hak dan kewajibannya.
4. Diharapkan pemerintah dapat memberantas secara maksimal film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi, karena

pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Yasir, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, Surabaya Permata Press, t.t
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya*, Semarang: PT. Toha Putra, 1989
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *kamus besar bahasa indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1988.
- Fokus Media, *undang-undang perlindungan saksi dan korban*. Bandung, 2010.
- Fondation, Pulih Newsletter Kekerasan seksual terhadap anak. Jakarta, 15 Juni 2010.
- Hamzah, Andi *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- <http://edukasi.kompasiana.com/2012/05/15/definisi-anak-463129.html>
- <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10804/>. tentang hak-hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 20 Nopember 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diakses pada tanggal 25 agustus 2012.
- http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/identifikasi_pedofilia.htm. duakses tanggal 15 oktober 2012.
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/kejahatan-pencabulanpersetubuhan.html>
“Definisi Tindak Pencabulan Anak dibawah Umur” Diakses tgl. 24 agustus 2012.
- Jamuka Sitorus. Hakim pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, 5 oktober 2012
- Pudjo Hunggul, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, 5 oktober 2012.
- Puspa. Yan Pramadya *Kamus Hukum edisi lengkap*. Semarang, Aneka Ilmu, 2008.
- Railam Silalahi, Hakim pengadilan Negeri Makassar, *wawancara*, 7 oktober 2012
- Sitorus, Jamuka *Hakim Pengadilan Negeri Makassar*
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar pasal demi pasal*. Bandung, Karya Nusantara, 1986.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta, oktober 1985, PT. Intermasa.
- Subekti, R., “Kuhap dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1990.

Sughandi. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1998.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Bandung, Fokus media 2010.

Undang-Undang RI . No. 23 tahun 2002. Jakarta, Sinar grafika,, Agustus 2003

Undang-Undang Perlindungan Anak. Sinar grafika. Jakarta, April 2005.

Wahid, Abd., & Muh. Irfan, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. cetakan I, Bandung, Rafika Aditama. 2001.

Yulia, Rena, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Yogyakarta: Grahaa Ilmu, 2010.

.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Irsan Maulana, lahir di Soppeng ,Kecamatan ...Kabupaten Soppeng pada tanggal 07 September 1990. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Muh. Nawawi S.H, dan Ibu Dra. Hj..Nurhaidah. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari TK Teratai ikip pada tahun 1995. kemudian ia

melanjutkan jenjang pendidikan sekolah dasar di SD Impres Tamamaung satu tahun 1996 kemudian melanjutkannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Negeri 8 Makassar pada tahun 2002, lalu kemudian ia melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 19 Makassar pada tahun 2005, pada jenjang tersebut selain aktifitas sekolah ia juga aktif pada organisasi intra sekolah yaitu Pengurus Ambalan Imadoki Apex Cocos Nucifera bidang Teknik Kepramukaan, Ketua Dewan Kwartir Ranting Manggala, Anggota Majelis Perwakilan Kelas (MPK). hingga pada tahun 2008 ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Ilmu Hukum, pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah juga aktif pada organisasi intra yakni sebagai Anggota BEM Fakultas Syariah dan hokum pada Departemen Kekaryaan, Kordinator Cabang Seni Teater UKM Seni Budaya eSA Periode 2009-2010 dan 2010-2011, Kepala bidang Penelitian dan Pengembangan. UKM Seni Budaya eSA periode 2011-2012 dan sekarang menjabat sebagai Ketua umum UKM SB eSA periode 2013-2014.